

Jl. Inu Kertapati No. 12, Kompleks DPRD, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Jambi 36124.  
Telp. +62 (0741) 66678, 66695. Fax. +62 (0741) 670509. e-mail : [sumatra.ss@gmail.com](mailto:sumatra.ss@gmail.com).

# REGIONAL PORTFOLIO COMMUNITY FOUNDATION SUMATERA -- MFP PROGRAM PHASE II

## 1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan kehutanan dalam konteks Sumatra sangatlah penting karena beberapa hal yaitu : 1) salah satu kelompok masyarakat miskin terbesar adalah mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan; 2) masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin menahun; 3) hampir semua kawasan hutan dikuasai oleh negara sehingga kepastian akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan masih menyisakan banyak persoalan; 3) hutan merupakan sumber penyedia layanan ekosistem mendasar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin; dan 4) belum terdapat strategi yang khusus untuk mengatasi kemiskinan masyarakat sekitar dan di dalam hutan.

Permasalahan kemiskinan dan kehutanan tersebut tersebar di semua bagian wilayah pulau Sumatra. Dengan total luas sekitar 47,6 juta ha, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2000), total populasi Sumatra mencapai 44.486.713 jiwa dan mayoritas tinggal di pedesaan. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2005) menyebutkan bahwa pada tahun 2000 terdapat sekitar 4.386.381 keluarga miskin di Sumatera yang sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal disekitar dan di dalam hutan<sup>1</sup>.

Masih tingginya angka kemiskinan ini sangat kontras dengan kenyataan tingginya laju kerusakan dan kehilangan hutan. Hasil kajian Bank Dunia (1999) memprediksikan bahwa sebagian besar hutan dataran rendah Sumatera akan hilang pada tahun 2005 dan selanjutnya kawasan hutan lahan basah pada tahun 2010<sup>2</sup>. Pada dekade terakhir ini, kawasan hutan alam terus menyusut karena kebijakan konversi hutan untuk Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit dan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Laporan FWI/GFW (2001) menyebutkan bahwa di Sumatera pada tahun 1991 terdapat konsesi HPH sekitar 15 juta hektare. Selanjutnya Wakker (2000) menyebutkan bahwa dari 4,1 juta hektar hutan yang dikonversi menjadi perkebunan secara nasional antara tahun 1982 – 1999, sebanyak 1,8 juta hektar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar berlokasi di Sumatera<sup>3</sup>. Kondisi ini diperparah oleh bencana kebakaran hutan secara menahun terutama sejak kebakaran hebat pada tahun 1997. Kompleksitas masalah *klasik* tersebut akan semakin terasa ketika isu perubahan iklim, terutama isu pengurangan emisi dari sektor kehutanan semakin kencang pada tahun-tahun terakhir ini.

Akan tetapi optimisme menuju pengelolaan hutan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat mesti terus dibangun. Apalagi pada tahun-tahun terakhir mulai terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Berbagai pihak termasuk pengambil kebijakan mulai meyakini perlunya penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Dalam konteks ini, program *Multistakeholder Forestry Programm* (MFP) fase I di Sumatra telah memberi pijakan yang cukup kuat pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/CBFM. Sejak tahun 2004 sampai fase pengakhiran program pada awal tahun 2007, MFP I di Sumatra menfokuskan dukungannya terhadap upaya-upaya yang mampu mensinergikan pengelolaan sumberdaya hutan lestari dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui MFP fase II, diharapkan berbagai hasil yang telah dicapai pada fase I tersebut dapat diperkuat, dikembangkan serta diperluas.

---

<sup>1</sup> Lihat Strategi MFP Regio Sumatra. *Menanam Kepercayaan Menuai Kemitraan*. MFP DfID-Dephut RI. 2004.

<sup>2</sup> Holmes, D., Rombang, W.M. 2001. *Daerah Penting Burung di Sumatra*. PKA/BirdLife International- Indonesia Programme, Bogor.

<sup>3</sup> FWI/GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, dan Washington D.C: Global Forest Watch.

# 1. Kerangka Logis Program

**Goal :**

Terwujudnya suatu masyarakat yang terbebas dari kemiskinan melalui terbukanya kesempatan mengelola sumber daya hutan secara mandiri, ekonomis, adil dan berkelanjutan di Sumatera.

**Tujuan Program :**

Berkembangnya berbagai inisiatif pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat yang ekonomis di Sumatera serta didukung oleh kebijakan pemerintah.

**Output dan Indicator :**

Output	Indicator
Kebijakan dan atau perencanaan pemerintah di berbagai level mengakomodasi hak akses dan kontrol masyarakat terhadap SDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rekomendasi yang dihasilkan berbagai studi untuk mendukung penguatan dan perluasan CBFM.</li> <li>• Adanya produk kebijakan mulai dari level desa, kabupaten, propinsi serta nasional yang memberi kepastian terhadap masyarakat dalam pengelolaan SDH.</li> <li>• Adanya produk hukum, perencanaan pembangunan (RTRW K/P, RPJMD), anggaran atau program teknis pemerintah daerah yang mengakomodir dan mendukung inisiatif CBFM.</li> <li>• Adanya site CBFM yang bisa dijadikan model bagi para pihak dalam pengelolaan hasil hutan (kayu, non kayu, carbon, jasa lingkungan) secara lestari dan ekonomis.</li> </ul>
Tersedianya model-model pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat yang memberi manfaat bagi perbaikan kesejahteraan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pilihan – pilihan yang bisa dikembangkan/diperluas dalam pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat berkaitan dengan sumber energi terbarukan, sumber pangan, alternatif perdagangan karbon, serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.</li> <li>• Model pengelolaan hutan lestari dan ekonomis oleh masyarakat berdasarkan karakteristik lokal/spesifik dapat dipromosikan.</li> </ul>
Berkembangnya usaha-usaha skala mikro berbasis produksi SDH lestari yang dikelola oleh masyarakat sekitar/dalam hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha skala mikro berbasis pada produksi SDH lestari yang dikelola oleh OR, KSM, BUMDES, dan NGO.</li> <li>• Terdapat sistem layanan, program uji coba, dan perjanjian kerjasama untuk usaha kecil kehutanan milik masyarakat dengan dunia usaha dan atau program teknis pemerintah (pusat dan daerah).</li> <li>• Adanya dukungan akses pasar dan skema pendanaan alternatif untuk usaha skala mikro SDH lestari melalui intermediasi dengan dunia usaha serta program pemerintah daerah.</li> <li>• Berjalannya proses peningkatan kapasitas untuk pelaku usaha skala mikro (bisnis plan, manajemen organisasi, teknik produksi – pasca produksi, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai).</li> </ul>
Tersedianya dokumentasi berbagai data, inisiatif serta pengetahuan para pihak dalam praktek CBFM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagai data, pengalaman dan pengetahuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat dimanfaatkan pihak-pihak untuk promosi dan pengembangannya.</li> <li>• Berjalannya proses belajar antar pihak yang memberi kontribusi bagi perluasan praktek CBFM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.</li> </ul>

Peningkatan layanan SSS sebagai grant making lokal kepada para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas layanan SSS sebagai grant making lokal kepada para pihak meningkat.</li> <li>• Cakupan wilayah layanan serta jaringan SSS terus meningkat sehingga bisa menyentuh lebih banyak pihak.</li> <li>• Kemampuan <i>resources raising</i> dan <i>resources mobilization</i> SSS meningkat dari tahun ke tahun.</li> </ul>
---	---

## 2. Rencana Kerja (*Indicative*)

Output	Relasi dengan Output MFP 2	Peluang Aktifitas	Y1	Y2	Y3
Kebijakan dan atau perencanaan pemerintah di berbagai level dapat dipengaruhi untuk mengakomodasi hak akses dan kontrol masyarakat terhadap SDH	Output 1, output 2, output 6	Dukungan untuk studi – studi (identifikasi site, konflik PSDH, evaluasi terhadap program sebelumnya) yang mendukung penguatan dan perluasan CBFM.			
		Dukungan untuk persiapan, perluasan areal atau penambahan jumlah kelompok HKm yang memperoleh izin definitif (penguatan kelompok, penyiapan peta usulan, penyusunan rencana kelola, lobby/mediasi).			
		Dukungan untuk penyusunan produk hukum lokal, Perda dan atau perencanaan daerah (seperti RTRW-K/P, RPJM/P) yang mendukung CBFM, jasa lingkungan, pendekatan DAS, serta persiapan TLAS, REDD atau <i>carbon trading</i> .			
		Dukungan untuk persiapan berbagai instrumen pada site CBFM sebagai model pengelolaan hasil hutan kayu legal dan berkelanjutan oleh masyarakat.			
		Advokasi anggaran atau program pembangunan kabupaten dan propinsi untuk mendukung inisiatif mitra SSS di tingkat lapangan.			
		Dukungan untuk gagasan-gagasan baru yang berpeluang memperkuat kebijakan CBFM.			
Tersedianya model-model pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat yang memberi manfaat bagi perbaikan kesejahteraan dan dapat direplikasi.	Output 1, output 2, output 3	Dukungan untuk studi komparasi yang memberi dampak bagi perluasan/replikasi model CBFM yang sudah ada.			
		Dukungan untuk persiapan (konsolidasi dan konsultasi di berbagai level) serta rencana implementasi TLAS, KPH, REDD atau carbon trading serta kaitannya dengan berbagai inisiatif CBFM.			
Berkembangnya usaha-usaha skala mikro berbasis produksi SDH lestari yang dikelola oleh masyarakat sekitar/ dalam hutan.	Output 1, output 3	Fasilitasi dan mediasi pengembangan modal Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada site fokus kepada perbankan dan sumber-sumber dana alternatif (dunia usaha, pemerintah).			
		fasilitasi untuk program uji coba dan kerjasama pengembangan usaha kecil kehutanan milik masyarakat pada site model CBFM yang potensial (agroforest, community logging pada hutan adat, DAS, KHDTK, kawasan mangrove) dengan dunia usaha dan pemerintah.			
		Dukungan untuk kajian potensi dan peluang pasar hasil hutan kayu/non kayu serta potensi carbon pada site atau cluster fokus (DAS Batanghari, Pantai Timur Deli, dll).			
		Penyediaan data dan informasi timbal balik (produsen – pasar) melalui SIS (Simpul Informasi Sumatra) terhadap produk kayu, non kayu, dan carbon dari site potensial.			
		Dukungan untuk temu bisnis bekerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha.			

Output	Relasi dengan Output MFP 2	Peluang Aktifitas	Y1	Y2	Y3
Berkembangnya proses pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, serta pendokumentasian data dan inisiatif para pihak dalam praktek CBFM.	Output 1, output 2, output 3	Dukungan teknis dan fasilitasi (training, magang, studi banding) untuk peningkatan kapasitas mitra SSS (organisasi rakyat, kelompok perempuan, LKM, BUMDES, dan KSM) dalam pengelolaan organisasi, perencanaan usaha, serta pemanfaatan teknologi.			
		Fasilitasi pengembangan paket – paket pengetahuan dan pendokumentasian inisiatif/praktek CBFM.			
		Pengembangan Simpul Informasi Sumatra (SIS) sebagai media pengelolaan data, informasi, dan pembelajaran CBFM.			
		Dukungan untuk peningkatan kapasitas terhadap instansi pemerintah kab/prop, NGO, universitas, atau forum/kelembagaan multipihak agar memahami berbagai aspek TLAS.			
Peningkatan layanan SSS sebagai grant making lokal kepada para pihak.	Output 2, output 5, output 6	Pengembangan instrumen kelembagaan serta peningkatan kapasitas personel pengelola SSS melalui training, magang, studi banding.	Dilakukan bersama service provider		
		Fasilitasi dan dukungan advokasi kebijakan untuk memperkuat inisiatif mitra ke berbagai level (regional dan nasional)			
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik internal SSS maupun terhadap mitra			
		Pengembangan kemitraan SSS dengan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.			

### 3. cakupan penerima manfaat

- Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
- Departemen Kehutanan dan UPT di daerah.
- Pemerintah Daerah Propinsi: Jambi, Bengkulu, Sumbar, Riau, Sumut, Sumsel, Lampung dan pemerintah kabupaten yang akan menjadi lokasi kegiatan.
- Pemerintah Desa, kenagarian, pahmungan.
- Kelompok kerja / forum – forum multipihak (kabupaten, DAS, dll).
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- BSO – Business Supporting Organization

### 4. kondisi kelembagaan SSS dan strategi dasar pengelolaan program

Saat ini secara kelembagaan SSS masih berada dalam perwalian KKI Warsi. Dalam operasional sehari-hari, manajemen SSS terpisah dari KKI Warsi baik dari segi pengelolaan keuangan maupun orientasi program. SSS dilengkapi oleh sebuah Komite Regional yang menentukan arah dan kebijakan strategis SSS. Komite ini juga berfungsi menyeleksi usulan yang masuk dan memutuskan proposal yang akan didukung atau ditolak. Anggota Komite Regional SSS berjumlah 5 orang yang merepresentasikan keterwakilan sub-regio, keahlian, multi-pihak, dan gender.

SSS juga telah mengembangkan prinsip dasar pengelolaan program, desain pengembangan program, serta strategi implementasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis SSS 2007 – 2011 yaitu :

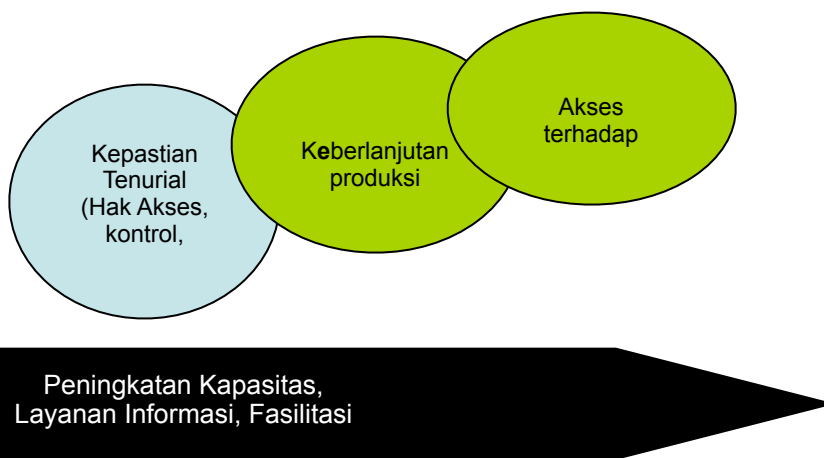
#### 5.1. Prinsip Dasar dan Desain Pengembangan Program

**a. Keberlanjutan**

Mengupayakan keberlanjutan yang dibentuk dengan justifikasi secara terbuka. Dengan prinsip ini maka keberlanjutan ditempatkan pada pusat dari strategi pengelolaan program baik bagi SSS maupun mitra. Ditingkat mitra, inisiatif yang didukung adalah yang berpotensi dikembangkan sampai tumbuhnya usaha kehutanan skala mikro.

**b. Layanan yang disertakan/diintegrasikan**

Jenis layanan yang akan dipilih adalah layanan yang disertakan (*embedded service*), yaitu suatu jenis layanan yang dikombinasikan dengan layanan lainnya. Pilihan ini diambil karena layanan SSS akan diutamakan bagi kelompok yang memiliki segala keterbatasan terhadap permodalan, informasi, teknologi, dan kapasitas (SDM dan produksi). Secara umum layanan yang dikombinasikan akan meliputi : 1) layanan agar masyarakat memperoleh kepastian hak akses dan kontrol terhadap SDA; 2) layanan untuk mendukung proses produksi SDA lestari; 3) layanan untuk mendapatkan akses terhadap dana, informasi, teknologi dan pasar; 3) serta layanan peningkatan kapasitas dan pembelajaran yang melibatkan multipihak.



**c. Fleksibel**

Melakukan intervensi yang fleksibel, *multi-faceted* dengan sentuhan ringan, tidak langsung dan bersifat fasilitasi.

**d. Bekerja pada cluster/site fokus**

Mengingat terbatasnya sumberdana dan sumberdaya serta untuk mendapatkan hasil-hasil program semaksimal mungkin, maka SSS bekerja pada site fokus / cluster dimana dukungan oleh SSS bisa dikombinasikan. Saat ini SSS telah bekerja pada site fokus / cluster Lampung<sup>4</sup>, DAS Batanghari<sup>5</sup>, dan Sumsel<sup>6</sup>. Sampai tahun 2011, SSS merencanakan untuk mengembangkan kemitraan di Pesisir Timur Deli (Sumut), Koridor Teso Nilo – Bukit Tiga Puluh (Riau), DAS Musi – Ketahun

<sup>4</sup> Program SSS pada site ini akan diarahkan untuk mendukung pengembangan lebih lanjut : 1) pengelolaan Repong Damar yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Lampung Barat; 2) pengelolaan tanaman coklat yang bersinergi dengan pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung di Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Barat dan Lampung Tengah; dan 3) perluasan areal HKm yang memperoleh ijin definitif.

<sup>5</sup> Program SSS di site fokus ini adalah untuk mendukung berbagai bentuk alternatif pengelolaan sumber daya alam pada kawasan ex. HPH dan HTI. Selain itu juga program akan diarahkan untuk membantu pengembangan lembaga keuangan mikro yang selama ini telah dikembangkan masyarakat dan sangat bermanfaat dalam mendukung berbagai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu baik dari kawasan hutan maupun dari lahan masyarakat.

<sup>6</sup> Program pada site ini untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah ada seperti pengelolaan DAS dengan pendekatan *Bioregion*, pengelolaan Taman Nasional dengan *Collaboratif Management*, pengelolaan Hutan Adat, pengelolaan *Rubber Agroforest* dan pengembangan produk organik pada *bufferzone* Taman Nasional. Site DAS Batanghari ini akan meliputi propinsi Jambi dan Sumatera Barat serta mencakup 4 Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), sebagian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), dan Taman Nasional Berbak (TNB).

(Bengkulu) serta cluster/site potensial lainnya baik dengan pendekatan administratif maupun ekosistem.

## **5.2. Strategi Pengelolaan Program**

Mengingat luasan wilayah, kompleksitas permasalahan, perbedaan kemampuan mitra, serta adanya kondisi-kondisi spesifik disetiap daerah maka dalam implementasi program pada masa mendatang, SSS akan menggunakan pendekatan fasilitasi 3 sub-regio yaitu :

- a. Sub-regio Utara, terdiri dari Sumatera Utara, Riau, Kepri, dan Sumatra Barat.
- b. Sub-regio Tengah, terdiri dari Jambi dan Bengkulu.
- c. Sub-regio Selatan, terdiri dari Sumatra Selatan, Lampung, dan Babel.

Di setiap sub-regio, SSS akan dibantu oleh seorang fasilitator yang akan memfasilitasi mitra-mitra mulai dari pengembangan gagasan awal, implementasi program, serta monitoring. Sub-regio tengah akan langsung ditangani oleh Program Manager SSS yang juga mengkoordinasikan fasilitator-fasilitator di sub-regio.

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menjamin pencapaian hasil-hasil program, SSS mengembangkan monitoring berkala terhadap inisiatif mitra setiap 6 bulan. Sedangkan pada setiap akhir tahun/akhir periode kerjasama dengan mitra akan dilakukan evaluasi secara bersama. Baik dalam monitoring 6 bulanan maupun evaluasi akhir, SSS akan melibatkan Komite Regional, fasilitator sub-regio serta pihak lainnya yang releva. Selain itu SSS juga dapat menggunakan jasa evaluator eksternal untuk membantu SSS sendiri maupun mitra dalam mengukur pencapaian, menilai kendala, serta memberi alternatif bagi penguatan pencapaian program oleh mitra.

Di setiap sub-regio, jika diperlukan dapat dilakukan koordinasi serta konsolidasi 3 bulanan terhadap mitra yang akan difasilitasi oleh fasilitator sub-regio. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin berbagai kendala di tingkat mitra baik menyangkut aspek manajemen maupun substansi program

## **4. Transparansi dan Akuntabilitas**

Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, SSS selalu mempublikasikan setiap tahapan pengembangan program mulai dari call proposal, laporan perkembangan kegiatan, serta berbagai informasi lainnya kepada para pihak. Selain itu setiap akhir periode kerjasama program dengan pihak lain selalu dilakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

## **5. lampiran - lampiran**

- a. Informasi kelembagaan (lampiran 1)
- b. Kemitraan yang telah dikembangkan (lampiran 2)

<b>INFORMASI KELEMBAGAAN</b>
------------------------------

**1. Nama Organisasi :**

Sumatra Sustainable Support (SSS)

**2. Alamat Lengkap :**

Jl. Inu Kertapati No. 12, Kompleks DPRD, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Jambi 36124.  
Telp. +62 (0741) 66678, 66695. Fax. +62 (0741) 670509. e-mail : [sumatra.ss@gmail.com](mailto:sumatra.ss@gmail.com).

**3. Status Organisasi :**

Lembaga Swadaya Masyarakat.

**4. Tanggal Berdiri:**

19 Oktober 2006.

**6. Susunan Komite Regional :**

Ketua : Hambali  
Sekretaris : Rama Zakaria  
Bendahara : Syafrizaldi  
Anggota : Emilia

Nonette Royo

**7. Direktur/Ketua : Mahendra Taher****8. Tujuan Organisasi :**

Tujuan SSS adalah "mewujudkan suatu masyarakat yang terbebas dari kemiskinan melalui terbukanya kesempatan mengelola sumber daya alam secara mandiri, adil dan berkelanjutan di Sumatra". Untuk mencapai tujuan tersebut, SSS akan :

- a. Mendukung berbagai upaya masyarakat untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang adil, demokratis dan lestari.
- b. Mendukung inisiatif perubahan kebijakan pengelolaan SDA baik di level nasional maupun daerah yang lebih mengedepankan keberlanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- c. Menyediakan dukungan yang terintegrasi (peningkatan kapasitas, keuangan, akses pasar) bagi organisasi rakyat, organisasi non pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, kelembagaan desa dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam pengembangan usaha-usaha skala kecil berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- d. Memperkuat dan mengembangkan aspek kelembagaan dan pengelolaan SSS sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional serta mampu memberi inspirasi bagi munculnya *community foundation* lainnya di Sumatra.

**9. Sumber dan Jumlah Organisasi Lain yang Memberikan Dukungan/Dana dalam 3 (tiga) tahun terakhir**

No	Tahun	Pemberi Dana/ Dukungan	Judul Kegiatan	Jumlah Dukungan / Dana (Rp)
1	2006 - 2008	DfID	Pengembangan Community Foundation di Sumatra.	1.639.844.200
2	2007 - 2008	Kemitraan	Mengupayakan Terbukanya Kesempatan dan Meningkatnya Kemampuan Masyarakat untuk Mengelola Sumber Daya Hutan Secara Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan di Sumatra	1.799.930.000

**Lampiran – 2**  
Gambaran Kemitraan yang Telah Dikembangkan SSS

No	Lembaga Mitra	Lokasi	Judul Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	INFOKUS	Padang-sumbar	Pengelolaan Layanan INFOKUS	61.566.700,-
2	CBFM Transisi	Lampung, Jambi, Bengkulu	Fasilitasi inisiatif CBFM di region Sumatra	124.584.755,-
3	Terminal NTFP Lampung	Lampung	Intervensi Perdagangan Kakao Fermentasi Oleh Terminal NTFP Lampung	119.100.000,-
4	PMPRD Krui	Lampung Barat	Membangun Dukungan Multipihak Terhadap Sub Sector Peningkatan Nilai Jual Damar Mata Kucing (Shorea Javanica) di Pesisir Krui Lampung Barat	120.247.500,-
5	Rimba Bungaron	DAS Batanghari, Jambi-sumbar	Membangun Mitra Bersama Dalam Perluasan Pasar dan Melakukan Penjualan/Perdagangan Komoditi Ramah Lingkungan	113.280.000,-
6	LPN Usaha Mandiri	Dharmasraya, Sumbar	Pengembangan Kapasitas dan Permodalan LPN Usaha Mandiri	115.000.000,-
7	KSRM Paluh	Deli Serdang, Sumut	Melestarikan Hutan Mangrove Dengan Mengembangkan Usaha Budidaya Ikan Mujair Dan Kepiting Bakau Dengan Pertambakan Pola Empang Parit	31.540.000,-
8	LKM Dahlia	Kab. Bungo, Jambi	Kemandirian LKM Dahlia Dalam Memberikan Akses Modal Usaha Bagi Petani Karet Campur (Agroforest) di Hamparan Lubuk Beringin	115.000.000,- 188.635.000,-
9	Watala	Lampung	Studi Kolaborasi : Mendukung HKm Secara Lebih Adil dan Demokratis di Lampung (studi terhadap kebijakan implementasi HKm menuju percepatan pencapaian 400.000 ha)	99.600.000,-
10	YKS	Bengkulu	Kajian Terhadap Implementasi Program HKm Tahun 2001 di Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong Propinsi Bengkulu	63.536.100,-
11	Ulayat	Bengkulu	Studi Pengembangan Hutan Desa Bukit Kayangan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu	32.088.800,-
12	Aillinst	Jambi	Sosialisasi dan Workshop Regional Menjalin kesepahaman Menyikapi isu Climate Change Pasca COP 13 Bali	49.032.952,-
			Mendorong Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Yang Adil, Ekonomis Dan Lestari di Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo	198.800.000,-
13	PSHK-ODA	Sarolangun - Bungo	Mendorong Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo.	89.582.082,-
14	Yayasan Gita Buana	Sarolangun	Mendorong Kepastian Usaha Jernang Sebagai Upaya Mengurangi Tekanan Terhadap Ekosistem Hutan Bukit Bahar – Tajau Pecah.	192.175.000,-
15	YKMP	Ogan Ilir - Sumsel	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Desa Secara Partisipatif yang Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir	198.025.000,-
16	Wadah Rembug Tani Hutan (Waremtahu)	Lampung	Memperluas Dukungan dan Kapasitas Petani Pengelola HKm di Kecamatan Sumber Jaya dan Way Tenong Dalam Pengelolaan SDA di Lampung Barat yang Adil, Demokratis dan Lestari	189.950.000,-

